

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ISLAM RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI DESA WONOSARI KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI
(Studi Kasus Pendidikan)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**



OLEH :

Barokatulaili

NPM : 177310932

**PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Barokatulaili
NPM : 177310932
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di
Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten
Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konfrehensif.

Pekanbaru, 19 April 2022

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si



Nina Yuslaini, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Barokatulaili
NPM : 177310932
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di
Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten
Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 19 April 2022
An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua



Nina Yuslaini, S.IP., M.Si

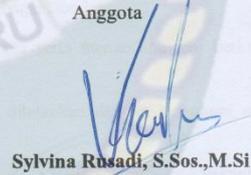


Data Wardana, S.Sos., M.IP

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Anggota


Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 49 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Barokatulaili
N P M : 177310932
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH) di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan).**

Struktur Tim :

1. Nina Yuslaini, S.IP., M.Si.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Data Wardana, S.Sos., M.IP	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si.	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 April 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

10. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
11. Yth. Ketua Prodi.....
12. A r s i p -----sk.penguji-----

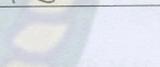
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 435 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 12 April 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Rabu tanggal, 13 April 2022 jam 14.00 – 1500 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Barokatulaili
NPM : 177310932
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan).**

Nilai Ujian : Angka : " 76,33 " ; Huruf : " B " "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nina Yusafiani, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Data Wardana, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 13 April 2022
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan / Bid. Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Barokatulaili
NPM : 177310932
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di
Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten
Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan)

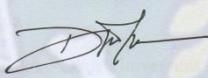
Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 19 April 2022

Ketua


Nina Yusraini, S.IP., M.Si

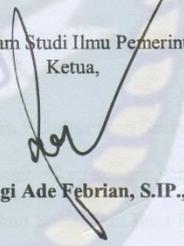
An. Tim Penguji
Sekretaris


Data Wardana, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga di ridhoi Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalan islam.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya atas dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga penyusunan Skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan dan seluruh dosen yang mengajar Program Studi

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Ibu Nina Yuslaini, S.IP.,M.Si selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Terima kasih kepada seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal hingga akhir.
7. Terimakasih kepada kedua orang tua (Bapak dan Ibu) dan abang yang selalu memberi do'a dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa serta tidak pernah lelah dan mengeluh untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya agar menjadi orang yang lebih baik.
8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan ilmu pemerintahan angkatan 2017 Azlinda S.IP, Erlianda Sari S.IP, Sulistriani S.IP, Sintya Delpianti D, S.IP, Susianti S.IP.
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari Skripsi ini mungkin banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penulis

berharap kemakluman dari para pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Wassalamualaikum WR.WB

Pekanbaru, 19 April 2022

Penulis

BAROKATULAILI



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
SURAT PERNYATAAN.....	xiii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	13
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	13
2. Konsep Kebijakan.....	18
3. Konsep Evaluasi.....	22
4. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH).....	28
5. Konsep Kemiskinan.....	30
B. Penelitian Terdahulu.....	36
C. Kerangka Pikir.....	37
D. Konsep Operasional.....	38
E. Operasional Variabel.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43

A. Tipe Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Informan dan Key Informan.....	44
D. Teknik Penentuan Informan	45
E. Jenis Dan Sumber Data	45
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Teknik Analisis Data	47
H. Jadwal Waktu Kegiatan	48
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	49
A. Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Meranti	49
1. Keadaan Geografis	50
2. Batas Administrasi Daerah.....	51
3. Kondisi Penduduk	52
B. Profil Desa Wonosari	53
1. Sejarah Desa Wonosari	53
2. Keadaan Geografis Desa Wonosari	53
3. Jumlah Penduduk	54
4. Tenaga Kerja Menurut Mata Pencarian	56
5. Agama	57
6. Pendidikan	59
7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	60
C. Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti	63
1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti	66
2. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti	66
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial	67
BAB V HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Identitas Responden	69
1. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	69
2. Identitas Informan Berdasarkan Umur	70
B. Pembahasan dan Hasil	71
1. Efektivitas	72

2. Efisiensi	74
3. Kecukupan	77
4. Pemerataan	79
5. Responsivitas	82
6. Ketetapan	84
7. Pendamping PKH	87
8. Masyarakat Penerima PKH	91
C. Faktor Penghambat Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti	96
D. Analisis Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti	97
BAB VI PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti ...	38
Gambar II.1 Peta Kabupaten Kepulauan Meranti	51



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Tabel Jumlah Kartu Keluarga (KK) Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti	8
Tabel I.2	Data Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti	9
Tabel I.3	Data Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Jenjang Pendidikan Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti	10
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)	36
Tabel II.2	Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti	41
Tabel III.1	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti	48
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin	53
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti	55
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.....	55
Tabel IV.4	Jumlah Penduduk Menurut Suku Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.....	56

Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan dan Mata Pencaharian Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti	57
Tabel IV.6 Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.....	58
Tabel IV.7 Jumlah Masjid dan Mushalla Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti	58
Tabel IV.8 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti	59
Tabel IV.9 Jumlah Sekolah Yang Ada Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti	60
Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	69
Tabel V.2 Jumlah Informan Berdasarkan Umur	70



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Barokatulaili
NPM : 177310932
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 April 2022

Dernyataan,



Barokatulaili

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI DESA WONOSARI KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI (Studi Kasus Pendidikan)**

ABSTRAK

**Oleh:
Barokatulaili
177310932**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu Desa yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan sekaligus meningkatkan sumber daya manusia terutama pada kelompok keluarga miskin program ini dikhususkan pada tiga komponen yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun indikator penelitian ini yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penentuan informan ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu yang melibatkan orang-orang tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan cara evaluasi terhadap pelaksanaan mekanismenya di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti telah berjalan dengan baik. Demikian juga halnya dengan dampak Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga miskin yang memberikan manfaat cukup besar bagi kehidupan masyarakat miskin.

Kata kunci : Evaluasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Pendidikan

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) IN WONOSARI VILLAGE OF STIMULI DISTRICT OF MERANTI ISLANDS (Education Case Study)

ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH) is a social protection program that provides assistance to Very Poor Households (RTSM) based on established terms and conditions. Wonosari Village, Stimuli District of Meranti Islands Regency is one of the villages that get the help of the Family Hope Program (PKH) to overcome poverty while increasing human resources, especially in poor family groups, this program is devoted to three components, namely education, health, and social welfare. This research uses qualitative research methods. The indicators of this study are Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equalization, Responsiveness and Accuracy. This research was conducted at the Meranti Islands Regency Social Service. The data collection techniques used are interviews, observations and documentation. The technique of determining informants is determined intentionally on the basis of certain criteria or considerations involving certain people. This research aims to find out the results of the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Wonosari Village of Meranti Islands District Stimuli District by means of evaluation of the implementation of its mechanism in the field. The results of this study showed that the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Wonosari Village of Meranti Islands District Stimuli District has been going well. Likewise, the impact of the Family Hope Program (PKH) for poor families who provide considerable benefits for the lives of the poor.

Keywords: Evaluation, Family Hope Program (PKH), Education

BAB I

PENDAUHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk tercapainya tujuan negara Republik Indonesia maka disusunlah sistem pemerintahan rasional yang terdiri Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari tiga puluh empat provinsi serta jumlah penduduk yang banyak. Jumlah penduduk Indonesia saat ini lebih kurang sekitar dua ratus enam puluh juta jiwa dengan profesi yang berbeda-beda. Profesi atau pekerjaan yang banyak digeluti oleh masyarakat adalah petani, buruh, supir, dan sebagainya. Berdasarkan dari upah yang diperoleh setiap pekerja tersebut belum mampu untuk memenuhi kebutuhan primer bagi pekerja tersebut. Dapat dikatakan kebanyakan masyarakat Indonesia hidupnya belum sejahtera atau dengan kata lain adalah miskin.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menekankan pada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan

diperlakukan secara tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk wujud, tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Fungsi pemberdayaan yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya. Fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah, dalam arti, semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat *bargaining position*, dan semakin integratif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

Pemberdayaan harus terus-menerus, komprehensif dan simultan, sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamik antara pemerintah dengan yang diperintah. Dalam hubungan itu diperlukan berbagai program pemberdayaan :

1. Pemberdayaan politik pemerintahan bertujuan meningkatkan bargain position yang diperintah terhadap pemerintah. Melalui bargaining

tersebut, yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan dan kepedulian, tanpa merugikan orang lain.

2. Pemberdayaan politik ekonomi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negatif pertumbuhan, pembayar risiko salah-urus, pemikul beban pembangunan, dan penderita kerusakan lingkungan.
3. Pemberdayaan politik sosial budaya bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui human investment, guna meningkatkan nilai manusia (human dignity), penggunaan (human utilization) dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia.
4. Pemberdayaan politik lingkungan dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara yang diperintah dengan lingkungannya terdapat hubungan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan untuk mempercepat dan mengurangi kemiskinan adalah dengan melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai Perpers nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program yang diselenggarakan oleh kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sangat miskin dengan maksud memutus rantai kemiskinan melalui pemberian bantuan non tunai dan akses pada bidang pendidikan dan kesehatan yang

berlandaskan pada Inpres nomor 3 Tahun 2010, tentang program pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi poin lampiran ke 46 tentang pelaksanaan transaksi penyaluran bantuan langsung tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM).

Masalah kemiskinan adalah masalah yang juga mengakibatkan gizi buruk dan anak-anak putus sekolah. Rendahnya kemampuan ekonomi sebuah keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) membawa dampak pada buruknya nutrisi dan gizi, serta menyebabkan banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pelajarannya dibangku sekolah. Sebagian diantaranya harus bekerja keras membantu mencari nafkah untuk keluarganya dan ada yang terpaksa menjadi anak jalanan. Semakin besar jumlah anak usia anak sekolah yang tidak mampu memperoleh pendidikan yang layak akan memperburuk kondisi sosial, ekonomi, politik pada masa yang akan datang dan mengakibatkan beban sosial yang sangat tinggi terhadap negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin pada pasal 28 dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin pemerintah bertugas :

1. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin
2. Memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin
3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam penanganan fakir miskin

4. Mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanganan fakir miskin
5. Menyusun dan menyediakan basis data fakir miskin
6. Mengalokasikan data yang memadai dan mencukupi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

Dasar hukum tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), jadi peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Dalam pasal 2 peraturan menteri sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur proses Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, yaitu :

1. Koordinasi persiapan pertemuan awal, agar calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat, PKH, pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi PKH pada pertemuan awal.
2. Distribusi formulir verifikasi, maksudnya adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
3. Validasi data, kegiatan validasi data dapat dilaksanakan pada calon KPM yang diundang dan hadir dalam pertemuan awal. Sedangkan calon KPM yang diundang tidak menghadiri pertemuan awal maka kegiatan validasi dapat dilakukan dengan cara pendampingan sosial PKH mengunjungi rumah calon KPM PKH. Calon KPM PKH menandatangani komitmen pada formulir validasi. Kegiatan validasi data dapat menggunakan aplikasi e-PKH dan/atau formulir validasi, penggunaannya diatur dalam petunjuk pelaksanaan formulir validasi.
4. Cetak formulir verifikasi, setelah melakukan validasi data peserta PKH di arahkan untuk mencetak formulir verifikasi data.
5. Pemutakhiran data rute status Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), pemutakhiran data bertujuan untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data dasar

program perlindungan sosial. Khusus PKH, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan.

6. Pemutakhiran rutin data verifikasi, yang dimaksud dengan pemutakhiran data rutin adalah pembaharuan data peserta PKH yang dilakukan setiap saat dan terus menerus sesuai dengan kondisi terkini peserta PKH. Hasil pemutakhiran ini akan berpengaruh pada jumlah bantuan selain verifikasi.

Kriteria Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang memenuhi satu atau beberapa kriteria yaitu ibu hamil/ ibu nifas/ anak balita. Anak pada usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah). Anak SD/MI/Paket A/ SDLB (usia 7-12 tahun). Anak SLTP/Mts/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun). Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Rancangan umum dijalankan oleh Kementerian Sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan melibatkan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang terkait. Tim Nasional PENCEPATAN Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), berperan untuk mengkoordinasikan berbasis data terpadu untuk seluruh program penanggulangan kemiskinan, termasuk penyiapan data sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemantauan serta evaluasi terpadu. (Triwulandari,2018)

Kemiskinan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan

kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan merupakan muara dari masalah sosial lainnya. Kompleksitas persoalan kemiskinan membutuhkan upaya penanggulangan yang utuh dan menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu dan terorganisir.

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program bantuan. Salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan bersyarat yang dinaungi oleh Kementerian Sosial. Program ini mulai dilaksanakan sejak Tahun 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) membuka akses kepada keluarga miskin terutama kepada ibu hamil dan anak balita maupun anak usia sekolah untuk memanfaatkan berbagai Fasilitas Layanan Kesehatan (faskes) dan layanan fasilitas pendidikan (fasdik) yang tersedia disekitar mereka. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) juga mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

Syarat yang diterapkan dalam program ini merupakan bentuk intervensi untuk membidik masalah kesejahteraan dan kesenjangan gender dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak mengherankan apabila dalam desain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan dana tunai Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) yang biasa disebut Pengurus Keluarga. Pemberian dana kepada pengurus keluarga diyakini akan dapat mendorong efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan.

Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga sangat miskin dengan syarat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan bagi keluarga miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga sangat miskin, sedangkan untuk jangka panjang, dengan sasaran dua bidang, yakni bidang pendidikan dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya dan pada bidang kesehatan dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Adapun jumlah Kartu Keluarga (KK) yang ada di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 1.1 : Tabel Jumlah Kartu Keluarga (KK) Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Nama Dusun	Jumlah Kartu Keluarga (KK)
1	Arjosari	101
2	Sidosari	103
	Jumlah	233

Sumber : Kantor Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan pada tabel diatas jumlah Kartu Keluarga di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti terbagi menjadi dua dusun yaitu arjosari terdapat 101 kepala keluarga dan dusun sidosari terdapat 103 kepala keluarga.

Pada peneliti ini, peneliti fokus pada Program Keluarga Harapan (PKH), dimana program ini menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 melalui Kementrian

Sosial. Program serupa dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) yang diterjemahkan menjadi bantuan tunai syarat. Program ini dilakukan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang sosial.

Tabel 1.2 : Data Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti 2020-2021

No	Nama Desa/Kelurahan Di Kecamatan Rangsang	Jenjang Pendidikan			Jumlah
		SD/Mi	SMP/Mts	SMA/SMK/MA	
1	Citra Damai	105	47	55	207
2	Dwi Tunggal	72	33	26	131
3	Gemasari	98	55	43	196
4	Penyagun	130	52	57	239
5	Repan	77	33	35	145
6	Sungai Gayung Kiri	99	39	30	168
7	Tanjung Bakau	81	46	43	170
8	Tanjung Gemuk	72	36	28	136
9	Tanjung Medang	75	39	31	145
10	Tanjung Samak	130	89	51	270
11	Tebun	65	34	26	125
12	Teluk Samak	98	44	49	191
13	Topang	200	112	97	409
14	Wonosari	39	22	20	81
Jumlah		1.341	681	591	2.613

Sumber : Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Wonosari

Berdasarkan tabel diatas data Peserta Penerima Keluarga Manfaat diseluruh Desa atau Kelurahan sudah dijelaskan pada setiap desa yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Sehubungan dengan hal tersebut Desa Wonosari merupakan salah satu Desa yang memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), di mana program ini diprioritaskan untuk Keluarga Sangat Miskin atau Rumah Tangga

Sangat Miskin dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya dibidang pendidikan atau kesehatan.

Tabel 1.3 : Data Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Jenjang Pendidikan Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Jenjang Pendidikan	Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	23	16	39
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	13	9	22
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	13	7	20

Sumber : Pendamping PKH Desa Wonosari

Dari tabel diatas peneliti memilih Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut ada masalah penelitian yang akan peneliti lakukan dan di lokasi tersebut masih terdapat beberapa masalah yang mengakibatkan PKH di Desa Wonosari belum berhasil. Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan peneliti fokuskan pada pendidikan bagi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan Rumah Tangga Miskin di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terlaksana namun pelaksanaan tersebut mengalami hambatan yaitu pola pikir dalam mengelola bantuan sosial tidak dipergunakan dengan baik untuk membiayai sekolah namun dipergunakan untuk kebutuhan pokok bagi keluarga penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan bagi pendidikan sendiri bertujuan untuk memunculkan generasi baru yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Pendidikan juga merupakan hal yang mendasar untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat dan mengubah pola pikir. Adanya pendidikan juga diharapkan masyarakat mampu memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang baik. Namun pada kenyataannya masyarakat Desa Wonosari masih belum memiliki kesadaran untuk menyekolahkan anaknya.

Perlu kita ketahui bersama penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini belum maksimal meski demikian pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masih harus bekerja keras mengatasi persoalan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dari uraian diatas penulis melihat ada beberapa fenomena yang terjadi di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti adalah :

1. Kurang tepatnya sasaran bagi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana masih banyak yang diberikan kepada orang yang mampu dibandingkan orang yang tidak mampu.
2. Kurang giatnya pendataan dari pendamping desa sehingga menimbulkan kecemburuan sosial terhadap masyarakat di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Dana yang disalurkan tidak digunakan sesuai kebutuhan terhadap masyarakat yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui, menganalisis, dan mendalami Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan judul

“Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah **“Bagaimana Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan)”.**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan).
2. Untuk mengetahui faktor pemnghambat dalam menjalankan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan).

b. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan terutama akan pentingnya pendidikan.
2. Secara akademis dapat dijadikan sumber atau alternatif dalam mengembangkan pengetahuan.
3. Secara empiris sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin memiliki dibidang yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Supaya penulisan karya ilmiah atau penelitian diperlukan konsep pada penelitian ini, maka penulis akan mencoba memperjelas konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar dapat mempermudah penulis untuk memecahkan permasalahan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut David Apter pemerintahan itu merupakan satuan anggota yang paling umum memiliki : tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.(Syafi'i, 2013)

Menurut Drs. Musanef, ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan ke luar, atau

3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang di perintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.(Syafi'i, 2013)

Pengertian pemerintah dan pemerintahan terdiri dari dua konsep yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas yaitu mencakup semua alat kelembagaan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara yang bertindak atas nama negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit yaitu aparatur atau kelengkapan negara yang mempunyai tugas dan kewenangan kekuasaan eksekutif saja.(Sari,dkk,2020)

Menurut H. A. Brasz ilmu pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan di fungsikan secara baik ke dalam maupun keluar terhadap warganya. Sedangkan U. Rosenthal mengemukakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.(Syafi'i, 2013)

Pemerintahan adalah sekelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan suatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.(Syafi'i, 2014:12)

Menurut Ndraha 2002, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan *civil* dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan).(Syafi'i, 2013)

Secara substantif, menurut Rasyid (dalam Ndraha, 2005) makna pemerintahan tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan, ada tiga (3) fungsi hakiki pemerintahan yaitu :

1. Pelayanan (service)
2. Pemberdayaan (empowerment)
3. Pembangunan (development)

Selanjutnya menurut Ndraha (dalam Labono, 2014:37) pemerintahan memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer atau fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil dan layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder atau pemberdayaan sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi

sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (poerles) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Menurut Syafi'i (2013:12) secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah yang keduanya ada hubungannya.
2. Setelah ditambah awalan "pe" menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran "an" menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Dari pengertian pemerintahan sebagaimana dikemukakan diatas baik secara luas maupun sempit, menunjukkan bahwa baik yang diperintah maupun yang memerintah ada saling interaksi dalam memenuhi kebutuhan. Relasi dari keduanya kemudian memunculkan pemerintahan sebagai suatu kebutuhan.

Secara umum tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban umum warga masyarakat agar dapat menjalankan kehidupannya secara wajar.

Di dalam ilmu pemerintahan yang dimaksud dengan pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan. Jadi pemerintahan kabupaten/kota merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dan melayani masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota dapat dikatakan sebagai penyelenggara

birokrasi pemerintahan yang berada di kecamatan sedangkan pemerintah kecamatan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan kelurahan/desa.

Maka ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang digunakan untuk mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi dan eksekusi, dalam hubungan pusat dengan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

2. Konsep Kebijakan

James E. Anderson (1978) merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Sedangkan ilmuwan politik, Carl Friedrich, menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencari tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (Abdoellah, 2016)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih menjadi saling pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar-organisasi dan yang bersifat intra organisasi

9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah

10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.
(Taufiqurokhman, 2014)

Kebijakan (*policy*) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk memperlakukan kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan. Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan). (Anggara, 2014)

Perumusan kebijakan adalah proses sosial dimana proses intelektual melekat di dalamnya tidak berarti bahwa efektivitas relatif dari proses intelektual tidak dapat ditingkatkan, atau bahwa proses sosial dapat “diperbaiki”. (Dunn, 2003)

Richard Rose (1969) sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan

adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.(Suharno, 2013)

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” (J.E.Anderson, 1979: 4) digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.(Kadir, 2020)

3. Konsep Evaluasi

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation*; dalam bahasa Arab; *al-taqdir*, dalam bahasa Indonesia berarti; *penilaian*. Akar katanya adalah *value*; dalam bahasa Arab; *al-qimah*; dalam bahasa Indonesia berarti; *nilai*.

Menurut Wysong (1974), mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses untuk menggambarkan, memperoleh atau menghasilkan informasi yang berguna untuk mempertimbangkan suatu keputusan. Sedangkan menurut Uman, (2007: 91), mengemukakan bahwa proses evaluasi adalah untuk mencoba menyesuaikan data objektif dari awal hingga akhir pelaksanaan program sebagai dasar penilaian terhadap tujuan program.(Ratnawulan, 2014)

Evaluasi adalah mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Secara umum dikenal ada dua tipe evaluasi, yaitu evaluasi terus-menerus (*on-going evaluation*) dan evaluasi akhir (*expost*

evaluation). Tipe evaluasi yang pertama dilaksanakan pada interval periode waktu tertentu, misalnya per-triulan atau per-semester selama proses implementasi (biasanya pada akhir phase atau tahap suatu rencana). Tipe evaluasi yang kedua dilakukan setelah implementasi suatu program atau rencana. Evaluasi biasanya difokuskan pengidentifikasian kualitas program. Evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program.(Ranny Yulia, 2015)

Menurut Anderson (dalam Herman Susanto, 2016) evaluasi merupakan sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Evaluasi merupakan kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk yang termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, produser, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Menurut Arifin (2013:5) mengemukakan bahwa pada hakikatnya evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan.(Asrul, 2014)

Menurut Komsiyah (dalam Burhanudin, 2018) Wiersma dan Jurs membedakan antara evaluasi, pengukuran, dan testing. Keduanya berpendapat bahwa evaluasi adalah proses yang mencakup pengukuran dan mungkin juga testing, yang juga merupakan pengambilan keputusan tentang nilai. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Arikunto yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan

kegiatan mengukur dan menilai. Kedua pendapat ini secara implisit menyatakan bahwa evaluasi memiliki cakupan yang luas daripada pengukuran dan testing. Sedangkan menurut Casley dan Kumar (dalam Ranny Yulia, 2015) evaluasi adalah suatu penilaian berkala terhadap relevansi, kinerja, efisiensi, dan dampak suatu proyek dikatakan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, sementara Fink dan Kocekoff memberikan definisi evaluasi adalah merupakan serangkaian untuk menilai suatu program.

Selanjutnya menurut Subarsono (dalam Sisca Guswati) evaluasi kebijakan adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, memenuhi aspek akuntabilitas public, menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, sebaiknya dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

Menurut Subarsono evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Beberapa evaluasi tersebut memiliki tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan
4. Mengukur dampak suatu kebijakan
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan
6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang.

Grindle (dalam Jasri Daldi, 2018) menyatakan tentang evaluasi program atau kebijakan dapat menjadi 3 tipe umum, yang masing-masing memiliki bentuk pertanyaan yang berbeda-beda walaupun pertanyaan tersebut bersifat berkelanjutan, yaitu : pertama, evaluasi proses menanyakan persoalan “bagaimana program/kebijakan beroperasi?”, kedua, evaluasi dampak menanyakan persoalan “apa yang dihasilkan oleh program/kebijakan?”, dan yang ketiga analisis strategi mencari jawaban atas persoalan “seberapa efektifkah program/kebijakan tersebut memecahkan masalah dibandingkan dengan kebijakan lainnya yang ditujukan pada masalah yang sama?”.

Dilihat dari pendapat Ndraha (dalam Jasri Daldi, 2018) mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antar standar dengan fakta analisisnya. Ada beberapa model evaluasi yang dikemukakan oleh Ndraha, diantaranya :

1. Model *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan/perlakuan, tolak ukur adalah kondisi *before*.
2. Model *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah *das solen*.
3. Model kelompok, kontrol tes yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Seperti yang dikatakan Nurcholis (2005:169) menurutnya evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat tentang waktu. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari

suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengatur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan pelaksanaannya.

Menurut Mustopadidjaja (dalam Jasri Daldi, 2018) teori evaluasi untuk perbaikan mengandung implikasi diperlukannya langkah berupa penilaian (judgement). Dengan kata lain, evaluasi dilakukan dalam rangka menilai tingkat efektifitas dari suatu kebijakan (policy effectiveness). Hasil evaluasi bermanfaat dalam rangka perbaikan terhadap rumusan kebijakan dan/atau implementasi kebijakan.

Menurut Willian N Dunn (dalam Sisca Guswati, 2016) evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (asement) untuk mengetahui sejauh mana pencapaian suatu kebijakan dan sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi evaluator, kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

Willian N Dunn (dalam Sisca Guswati, 2016) mengembangkan enam indikator atau kriteria evaluasi, yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada peraturan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil di distribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber dalam masyarakat.
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektivitas,

efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan nasionalis substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan suatu kriteria individu tetapi nilai atau harga diri tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

4. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan (PKH) berada dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu, akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dalam istilah internasional dikenal dengan *Conditional Cash Transfers (CCT)*.(Rita Kalalingi,2018)

Menurut Purwanto (dalam Caktri Indra Gunawan, 2013), PKH merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu pesertanya dalam hal mendapatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan dasar.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penangan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.(Ade Kurniawan,dkk, 2021)

Dasar Hukum dari Program PKH adalah Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Landasan hukum Program Keluarga Harapan (PKH) ialah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM. Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan (Departemen Sosial RI, 2009).

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia terutama kelompok masyarakat miskin dengan upaya percepatan pencapaian target dan sasaran

perkembangan dimasa yang akan datang. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs).(Sri Davi Anggraeni,dkk, 2020)

Berdasarkan Panduan Umum PKH (2016:16) dalam (Rosdiana,dkk, 2020) dijelaskan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan dengan pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dibidang pendidikan dan kesehatan.

Secara umum (Maya Dehani,dkk, 2018), berdasarkan pedoman umum PKH tahun 2010 tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin dan sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target SDGs. Sedangkan secara khusus tujuan PKH antara lain :

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.
5. **Konsep Kemiskinan**

Menurut Siti (dalam Arif Citra Permana, dkk, 2018) kemiskinan adalah kondisi dimana terjadi ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar

manusia seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat terlihat dari banyak dimensi, dan untuk menggambarkan banyak dimensi kemiskinan digunakan istilah yang dikenal dengan “*plural poverty*”, yakni kurang mempunyai masyarakat untuk mengakses segala kebutuhan dasar yang penting bagi dirinya.

Menurut Supriatna (dalam Tamboto, Manongko 2019) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan.

Secara harfiah menurut Poerwadarminta (dalam Bambang Rustanto, 2015) kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya “tidak berharta-harta”. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat di konotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, kelompok, maupun keluarga sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (suryawati, 2005):

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapat seseorang atau kelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

2. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif adalah sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

3. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen.

4. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.

Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal juga dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah: kemiskinan Alamiah dan kemiskinan Buatan.

1. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan Alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan prasarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih) dan keadaan yang kurang subur.

2. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan Buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata.(Kartiawati, 2017)

Strategi yang bersifat Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat miskin yang diselenggarakan selama ini sangat bersifat jangka pendek dan itu sebenarnya menurut pengalaman negara maju seperti misalnya Amerika Serikat, BLT hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar tidak berdaya. Strategi yang dikembangkan uang berorientasi jangka panjang adalah justru bantuan tidak langsung yang bersifat pemberdayaan. Misalnya program peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja/usaha melalui pendidikan dan latihan-latihan kerja, perluasan jangkanya kerja (*networking*), dan informasi pasar, bantuan modal kerja.(Nano Prawoto, 2009)

David Cox (dalam Edi Suharto, 2014) membagi kemiskinan kedalam beberapa dimensi:

1. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsistem (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan),

kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan percepatan pertumbuhan perkotaan).

3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal diluar miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Kemiskinan menurut Emil Salim (dalam Febri Pradana, 2018) memiliki beberapa ciri yaitu :

1. Mereka umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah yang cukup, modal atau keterampilan karena faktor produksi yang dimiliki sedikit sekali sehingga kemampuan mereka memperoleh pendapatan sangat terbatas.
2. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh produksi dengan kekuatan sendiri.
3. Tingkat pendidikan rendah (tidak tamat SD)
4. Kebanyakan mereka tinggal di pedesaan
5. Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan serta pendidikan yang memadai.

Menurut Ellis (dalam Suharto, 2014) menyatakan bahwa kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

Dimensi kemiskinan secara sosial psikologi dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat. Faktor tersebut meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri semiskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Hambatan budaya seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumbernya, seperti tidak tersedianya lapangan pekerjaan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.I penelitian terdahulu tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Herman Susanto	Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan	Sama-sama menggunakan metode kualitatif	Fenomena penelitian terdahulu masih banyak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang ketergantungan dari bantuan PKH. Sementara fenomena penelitian ini masih banyak terdapat bantuan PKH yang tidak tepat sasaran.
2	Sri Davi Anggraeni Budi Setiawati Suwandi	Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Di Desa Kupang Nunding Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong	Sama-sama meneliti tentang Program Keluarga Harapan (PKH)	Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
3	Muhammad Daud Yushita Marini	Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin	Fenomena penelitian sama-sama tidak tepatnya sasaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	Penelitian terdahulu menggunakan konsep implementasi, sedangkan penelitian ini menggunakan konsep evaluasi

Dari penelitian diatas dapat dilihat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tidak tepatnya sasaran bantuan Program

Keluarga Harapan (PKH), sedangkan perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian serta tahun penelitian.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah alur penulisan karya ilmiah atau penelitian yang dilakukan yang didalamnya menjelaskan tentang keterkaitan antara konsep dengan teori-teori serta indikator-indikator relevan dan dipakai dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam peneliti yang peneliti lakukan terhadap “Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan)”.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat kerangka pikiran penelitian ini, sebagai berikut :

Gambar II.I kerangka pikiran Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan)



Sumber : modifikasi penulis 2021

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan konsep-konsep yang dipakai diantaranya :

1. Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana kemampuan memimpin antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.
2. Kebijakan adalah suatu langkah tindakan yang menjadi garis besar sejumlah aktor dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan.
3. Evaluasi adalah proses mengidentifikasi keberhasilan atau sebuah kegagalan suatu rencana kegiatan atau program.
4. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi RTSM.
5. Kemiskinan adalah kondisi seseorang ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.

Konsep evaluasi menurut William N. Dunn adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya

tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.

2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada peraturan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil di distribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan dan pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber dalam masyarakat.
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-

kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan nasionalis substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan suatu kriteria individu tetapi nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

E. Operasional Variabel

Dibawah ini dapat dilihat operasional variabel yang menyajikan konsep dari “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan)”.

Tabel II.2 Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indicator
1	2	3	4
Menurut William N. Dunn (2003: 608-610) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.	Evaluasi program keluarga harapan (PKH)	Efektifitas	1. Manfaat program 2. Kepuasan terhadap nominal bantuan program
		Efisiensi	1. Nominal besaran dana PKH 2. Lamanya proses penyaluran dana 3. Kepuasan peserta PKH terhadap kinerja pendamping PKH
		Kecukupan	1. Pemenuhan kebutuhan peserta PKH 2. Kecukupan nominal bantuan dana terhadap kebutuhan peserta PKH
		Pemerataan	1. Kesesuaian dan ketepatan dana bantuan PKH 2. Pemerataan pelaksana PKH dalam memilih peserta
		Responsivitas	1. Pengetahuan peserta PKH terhadap

1	2	3	4
			proses pelaksanaan PKH 2. Kepuasan peserta PKH terhadap proses pelaksanaan PKH.
		Ketepatan	1. Ketepatan RTSM dengan kriteria PKH 2. Kesesuaian pelaksanaan PKH dengan harapan peserta PKH.

Sumber : modifikasi penulis 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Dalam hal ini, peneliti kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan. Hal ini berarti mengidentifikasi suatu komunitas *culture-sharing*, lalu meneliti bagaimana komunitas tersebut mengembangkan pola-pola perilaku yang berbeda dalam satu waktu (yaitu etnografi). Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini adalah dengan mengamati perilaku para partisipan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. (Creswell, 2017)

Berdasarkan pemahaman metode penelitian kualitatif dari Creswell maka penelitian mengenai Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan) tepat menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan masih banyak terdapat peserta PKH yang bukan tergolong masyarakat miskin tetapi menerima bantuan PKH tersebut dan penelitian ini di fokuskan pada pendidikan yang ada di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Informan dan key informan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan dalam memperoleh data yang diutuhkan. Pemilihan informan ini melalui pertimbangan bahwa orang yang dipilih dapat memberikan informasi yang jelas sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang sedang diteliti.

Dengan ini penulis menemukan informan penelitian dalam penelitian ini berjumlah 6 (enam) orang, yang terbagi menjadi 3 (tiga) orang sebagai informan formal dan 3 (tiga) orang sebagai informan informal.

Tokoh formal yang menjadi subjek atau informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Desa Wonosari, Pendamping PKH, sedangkan tokoh informan dalam penelitian ini yaitu 3 (tiga) orang dari perwakilan masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Berikut nama-nama informan dan key informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti (Agusyanto S.IP.,M.Si)

2. Kepala Desa Wonosari (Moh.Zaini)
3. Pendamping PKH (Jufri S.IP)

Key Informan :

1. Masyarakat PKH tingkat SD
2. Masyarakat PKH tingkat SMP
3. Masyarakat PKH tingkat SMA

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan ini misalnya orang yang dianggap tahu tentang apa yang diharapkan.

Dalam penelitian ini, sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa penulis memilih informan dari orang-orang yang berkaitan langsung dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan lengkap.

E. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu:

1. Data primer

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dilapangan dari pihak pertama dalam hal ini responden terpilih sebagai sampel, yang didapatkan langsung dari sampel atau responden penelitian melalui wawancara dan observasi.

2. Data sekunder

Yaitu dari pihak yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menjadi objek penelitian ini yaitu :

- a. Keadaan geografis lokasi penelitian
- b. Struktur organisasi Dinas Sosial
- c. Peraturan Perundang-undangan
- d. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis disini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Observasi kualitatif adalah ketika penulis langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Pada umumnya observasi ini bersifat openO-ended dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipasi bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.(Creswell,2016)

2. Wawancara

Wawancara adalah peneliti dapat melakukan face-to-face interview (wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus grub interview (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan.(Creswell,2016)

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini bisa berupa dokumen publik misalnya koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat misalnya buku harian, surat, diari, dan e-mail.(Creswell, 2016)

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang mana pentingnya dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Tabel III.1 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian “Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan)”

No	JenisKegiatan	Tahun 2020-2021															
		Maret – Juli				Agustus - September				Oktober - November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	PersiapanPenyusunan	■															
2	Seminar UP		■														
3	Perbaikan UP			■													
4	Revisikuesiner				■												
5	Rekomendasi survey						■										
6	Survey lapangan								■								
7	Analisis data												■				
8	Penyusunan laporan hasil penelitian														■		
9	Konsultasi revisi skripsi															■	
10	Ujian komprehensif skripsi															■	
11	Revisi skripsi																■
12	Penggandaan skripsi																■

Sumber : Modifikasi Peneliti 2021

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, pada tanggal 16 Januari 2009.

Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti ini sendiri sebenarnya sudah diperjuangkan sejak begitu lama oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1990-an. Pada tahun 2005 tepatnya pada tanggal 25 Juli tokoh-tokoh masyarakat Meranti memperjuangkan dengan gigih hingga dibentuknya Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti atau biasa disebut dengan BP2KM sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan atau melepaskan diri dari Kabupaten Bengkalis.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008/ tanggal 11 Juli 2008.
2. Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Surat Gubernur Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008

tentang persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

5. Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18

Desember 2008 terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan atas pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa pada tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti sah menjadi Kabupaten yang berada di daerah Provinsi Riau.

1. Keadaan Geografis

Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti sangatlah dekat dengan dua negara tetangga yakni Singapore dan Malaysia. Secara Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada titik koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30'' - 1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ} 10' 0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triangle) Indonesia – Malaysia – Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah *Hinterland* Kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) Batam – Tj. Balai Karimun.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti

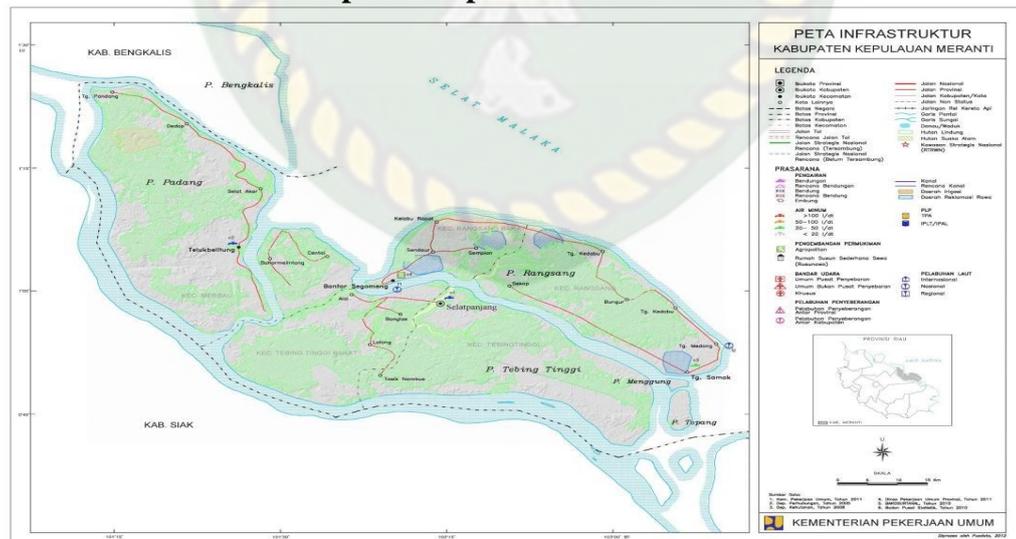
sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut. Hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri.

2. Batas Administrasi Daerah

Luas kabupaten Kepulauan Meranti : 3714,19 km², sedangkan luas kota Selatpanjang yang merupakan ibu kota kabupaten adalah 45,44 km² dengan batas wilayah wilayah diantara lainnya adalah :

- Utara : Selat Melaka dan Kabupaten Bengkalis
- Selatan : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Barat : Kabupaten Bengkalis
- Timur : Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar IV.1 Peta Kabupaten Kepulauan Meranti



*(sumber : <https://loketpeta.pu.go.id>)

Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai 3 pulau terpisah, dimana setiap pulau mempunyai kecamatan-kecamatan yang terdiri di dalam pulau tersebut diantaranya adalah Pulau Rangsang yang memiliki 3 kecamatan, Pulau Merbau 3 kecamatan dan Pulau Tebing Tinggi juga memiliki 3 kecamatan jadi keseluruhan kecamatan yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 9 kecamatan yang mempunyai 98 desa, 5 kelurahan, 41 RW dan 1.207 RT. Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan kecamatan Rangsang memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 14 Desa, sedangkan kecamatan Tebing Tinggi memiliki desa sedikit yaitu 9 desa. Selain itu, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki total 678 anggota BPD.

3. Kondisi Penduduk

Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kab. Kepulauan Meranti pada tahun 2019 tercatat sebanyak 182.192 jiwa yang terdiri dari 93.488 jiwa laki-laki dan yang terdiri dari 88.152 jiwa perempuan. Kecamatan yang terbanyak penduduknya adalah kecamatan Tebing Tinggi yaitu 56.192 jiwa penduduk dan kecamatan yang sedikit penduduknya adalah kecamatan Tebing Tinggi Timur yaitu 11.733 jiwa penduduk.

Tabel IV.1: Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tebing Tinggi Barat	8.342	7.467	15.809
Tebing Tinggi	28.658	27.534	56.192
Tebing Tinggi Timur	6.160	5.573	11.733
Rangsang	9.642	8.881	18.532
Rangsang Pesisir	8.723	8.248	16.971
Rangsang Barat	8.738	8.710	17.488
Merbau	7.378	6.796	14.174
Pulau Merbau	7.565	7.410	14.975
Tasik Putri Puyu	8.282	8.045	16.327
Jumlah Total	93.488	88.664	182.152

**(Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti)*

B. Profil Desa Wonosari

1. Sejarah Desa Wonosari

Desa Wonosari merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, desa ini baru saja dimekarkan pada Januari 2012 yang lalu dari kelurahan induknya yaitu kelurahan Tanjung Samak. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2012 tentang pembentukan Desa Wonosari. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna, serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk menata kembali wilayah desa di Kecamatan Rangsang.

2. Keadaan Geografis Desa Wonosari

Kecamatan Rangsang terdiri dari satu Kelurahan dan lima belas Desa. Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Tanjung Samak, sedangkan lima belas Desa tersebut adalah Desa Teluk Samak, Desa Repan, Desa Kemala Sari, Desa Tebun, Desa Tanjung Medang, Desa Tanjung Bakau, Desa Topang, Desa Gayung, Desa Penyagon, Desa Tanjung Gemuk, Desa Citra Damai, Desa Telesung, Desa Tenggayun Raya, Desa Dwi Tunggal Dan Desa Wonosari. Jarak antara desa Wonosari dengan pusat pemerintahan ibu kota Kecamatan lebih kurang 6 KM, sedangkan Ibu Kota Kabupaten terletak di Selatpanjang yang jaraknya dengan desa Wonosari sekitar 55KM.

Adapun batas – batas wilayah Desa Wonosari adalah:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan :Tanjungmedang
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan :Tanjungsamak
- c. Sebelah Baratberbatasdengan : Teluk Samak
- d. Sebelah Timur berbatas dengan :Citra Damai

3. Jumlah Penduduk

Dari data yang terdapat dari monografi Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019, penduduk desa Wonosari berjumlah 783 jiwa, yang terdiri dari 408 orang laki – laki dan 372 orang perempuan dan 233 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.2: Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Jumlah penduduk berdasarkan Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – laki	Perempuan	
1	Dusun I (satu)	213	205	418
2	Dusun II (dua)	198	167	365
Jumlah		411	372	783

Sumber: Kantor Desa Wonosari tahun 2020

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk laki – laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki – laki yang berdomisili di desa Wonosari adalah sebanyak 411 orang yang terdiri dari berbagai macam umur, sedangkan penduduk perempuan adalah sebanyak 372 orang yang terdiri dari berbagai macam tingkat umur. Selanjutnya jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, yang dibagi menjadi delapan kelompok, hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel IV.3 Jumlah penduduk menurut kelompok umur di desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	0-8	111	14.2%
2	9-16	109	13.9%
3	17-24	112	14.3%
4	25-32	124	15.8%
5	33-40	98	12.5%
6	41-48	101	12.9%
7	49-56	75	9.6%
8	57+	53	6.8%
Jumlah		783	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Wonosari Tahun 2020

Berdasarkan Tabel di atas maka terlihat bahwa penduduk yang terbanyak

yaitu tingkat umur 25-32 yaitu berjumlah 124 orang atau sebesar 15,8%, dan penduduk yang paling sedikit yaitu pada tingkat umur 57 tahun ke-atas yaitu berjumlah 53 atau sebesar 6,8%.

Jumlah penduduk diatas terdiri dari dua suku yang mendominasi, yaitu suku Melayu dan Jawa. Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan suku tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4 Jumlah penduduk menurut suku di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Suku / Etnis	Jumlah	Persentase
1	Jawa	702	89,66%
2	Melayu	54	6,90%
3	Batak	1	0,13%
4	Lainnya	26	3,32%
	Jumlah	783	100%

Sumber: Kantor Desa Wonosari tahun 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa di Desa Wonosari hanya ada dua sub suku yaitu suku jawa yang paling mendominasi di desa ini dengan jumlah penduduk 702 orang, dan suku Melayu dengan jumlah 54 orang.

4. Tenaga Kerja Menurut MataPencapaian

Mata pencaharian utama di desa Wonosari Kecamatan Rangsang adalah sebagai petani, sesuai dengan lingkungan tanah yang sangat subur dan masih luas sehingga di daerah ini cocok untuk bercocok tanam, cara bertani di desa ini masyarakat masih menggunakan cara tradisional karena belum tersedianya mesin – mesin canggih maupun kemampuan skill dari masyarakat itu sendiri. Di desa ini

pada umumnya memiliki kebun kelapa yang jumlahnya cukup besar, dan dalam jumlah yang besar hasil kelapa ini di ekspor ke Negara tetangga yaitu Malaysia. Disamping pertanian, ada juga penduduk yang bekerja sebagai Penghasil Industri Kecil/Industri Rumah Tangga, Buruh Bangunan, Pedagang, Pengangkutan, Pegawai Negeri Sipil, dan Jasa lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawahini:

Tabel IV.5 Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan dan mata pencaharian di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Jenis Mata Pencarian / Tenaga Kerja	Jumlah	Persentase%
1	Petani	301	56.58%
2	Pegawai Negeri Sipil	6	1.13%
3	Peternak	3	0.56%
4	Wiraswasta	200	37.59%
5	Guru	5	0.94%
6	Pegawai Honorer	17	3.20%
Jumlah		532	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Wonosari tahun 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa mata pencaharian masyarakat desa Wonosari yang paling banyak adalah Petani, yaitu berjumlah 301 orang atau sebesar 56.58%.

5. Agama

Agama yang di peluk oleh masyarakat di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang seratus persen adalah Agama Islam. Desa Wonosari penduduknya adalah dari suku Jawa dan Melayu serta memeluk agama Islam yang

merupakan agama yang telah dianut oleh nenek moyang sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel dibawahini:

Tabel IV.6 Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	783	100
2	Kristen Khatolik	-	-
3	Kristen Protestan	-	-
4	Budha	-	-
5	Hindu	-	-
	Jumlah	1637	100%

Sumber: Kantor Desa Wonosari tahun 2020

Berbicara mengenai kepercayaan atau Agama ini, tidak akan terlepas dari sarana pibadatan atau sarana untuk melaksanakan ibadah yang terdapat di desa Wonosari Kecamatan Rangsang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawahini:

Tabel IV.7 Jumlah Masjid dan Mushalla di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Sarana Pribadatan	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushalla/Surau	2
	Jumlah	4

Sumber Kantor Desa Wonosari tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Wonosari Kecamatan Rangsang mempunya dua Masjid, masing – masing Masjid tersebut yaitu Masjid Al- Falah yang terletak di Dusun I dan Masjid Al-Ikhsan terletak di Dusun II. Selanjutnya mempunyai dua Mushalla/Surau, masing – masing Mushalla/Surau tersebut adalah Surau Al-Iman yang terletak di Dusun I dan Surau Al-Khusna di

Dusun II.

6. Pendidikan

Pendidikan di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang pada umumnya sudah baik, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya penduduk yang buta huruf atau tidak bisa membaca, walaupun masih ada juga dijumpai penduduk yang tidak tamat sekolah. Kebanyakan dari penduduk yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sampai Sekolah Dasar berasal dari penduduk yang berusia 50 tahun keatas, ini disebabkan karena pada zaman mereka sekolah, mereka tidak mempunyai cukup biaya untuk melanjutkan pendidikan, dan fasilitas sekolahnya pun belum memadai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.8 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	34	4.80%
2	Tamat SD	223	31.45%
3	Tamat SLTP / Sedrajat	109	15.37%
4	Tamat SLTA / Sedrajat	315	44.43%
5	Tamat Akademi / Sedrajat	9	1.27%
6	Tamat Perguruan Tinggi	19	2.68%
	Jumlah	709	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Wonosari tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk desa Wonosari banyak yang hanya menyelesaikan sekolah dasar saja, yaitu berjumlah 223 orang atau sebesar 31,45%. Hal ini di sebabkan karena banyak nya penduduk yang kurang

mampu untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya berbicara masalah pendidikan, tidak terlepas dengan sarana pendidikan. Untuk melihat Sarana pendidikan di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang dapat di lihat pada tabel berikutini:

Tabel IV.9 Jumlah Sekolah Yang Ada Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	Pendidikan TK	1
2	Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN)	1
3	Madrasah Ibtidaiyah	3
	Jumlah	5

Sumber: Kantor Kepala Desa Wonosari tahun2020

7. Struktur Organisasi PemerintahanDesa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 39, menyebutkan “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”.

a. KepalaDesa

Kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa, yaitu menjalankan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah desa, urusan pemerintah umum, termasuk pembinaan ketentraman, dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai

sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

b. SekretarisDesa

Sekretariat desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu kepala desa dan pimpinan sekretariat desa. Sekretariat desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.

Untuk mrnjalkan tugas tersebut diatas maka sekretaris desa mempunyai fungsi yaitu:

- a) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan danlaporan
- b) Melaksanakan urusankeuangan
- c) Melaksanakan urusan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- d) Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa, apabila kepala desa berhalangan melaksanakantugasnya

c. KepalaUrusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya. Untuk menjalankan tugas tersebut maka kepala urusan mempunyai fungsi yaitu:

- a) Melaksanakan kegiatan urusan pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai dengan tugasnya masing – masing.
- b) Melaksanakan pelayanan administrasi

d. Kepala Dusun

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya. Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan kepala desa dalam kepemimpinan kepala desa di wilayah kerjanya.

Untuk menjalankan tugas tersebut, maka kepala dusun mempunyai fungsi yaitu:

- a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
- b) Melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya.
- c) Melaksanakan kebijakan kepaladesa.

e. Lembaga Pendayagunaan Masyarakat(LPM)

LPM adalah lembaga masyarakat di desa atau kelurahan yang tumbuh dari oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional, yang meliputi aspek – aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan.

Tugas pokok LPM adalah membantu pemerintahan desa dalam:

- a) Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas musyawarah
- b) Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong

masyarakat

- c) Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan didesa
- d) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
- e) Menggerakkan swadaya masyarakat
- f) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut LPM mempunyai fungsi, yaitu:

- a) Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan
- b) Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasila
- c) Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan
- d) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa dan kelurahan
- e) Pengordinasian perencanaan pembangunan
- f) Pengordinasian perencanaan lembaga masyarakat

C. Sejarah Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti

Dinas sosial merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Peraturan Bupati

Kepulauan Meranti Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai tugas :

- a. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial.
- b. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitas dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial.
- c. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial.
- d. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Sosial.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

1. Visi

Visi harus mudah dan dapat dibayangkan mengandung hasrat yang diinginkan dan mungkin dicapai terfokus dan berwawasan serta dapat dikomunikasikan. Mudah dipahami dengan baik oleh *stakeholders* dan masyarakat. Visi harus ringkas dan menarik minat, mudah diingat memberi inspirasi dan tantangan, dapat dipercaya dan konstanten dengan nilai strategis daerah visi sebagai titik temu antar *stakeholders*. Karena menyatakan dengan jelas keadaan keberadaan instansi. Berdasarkan karakteristik tersebut maka disusun lah Visi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut : “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial

Masyarakat”.

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai atau sesuatu yang harus dilaksanakan karena memperlihatkan secara jelas bidang-bidang pembangunan yang strategis. Misi memberikan gambaran tentang “mandate” dari *stakeholders* untuk membangun daerah. Misi mengkomunikasikan visi instansi termasuk kedudukan dan peranan *stakeholders* dalam proses tersebut.

Misi yang baik harus tegas sehingga efektif sebagai pengarah, dapat dikembangkan serta bukan merupakan daftar keinginan yang tidak mungkin dapat dicapai. Selain itu misi harus dapat diterima dan didukung pencapaiannya oleh *stakeholders*. Misi dinas lingkungan hidup adalah memberikan arahan jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan sebagai acuan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan sasaran serta kebijaksanaan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian misi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Perlindungan, Jaminan, Rehabilitas dan Pelayanan Sosial Bagi PMKS
- b. Meningkatkan Mutu Pelayanan Sosial Melalui Kelembagaan Sosial
- c. Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintahan yang Baik.

Adapun uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah

Kepala Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitas sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitas sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- 3) Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan pendukung dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitas sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitas sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- 5) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- 6) Pelaksanaan administrasi dinas sosial.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

2. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang-bidang,

perumusan, Umum, Kepegawaian, perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan administrasi Keuangan dan Perlengkapan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- 1) Membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- 2) Menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan.
- 3) Melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi bagian umum, kepegawaian, program, keuangan dan perlengkapan.
- 4) Melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meneliti laporan yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana.
- 5) Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

3. Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial.

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai

tugas dan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial keluarga dan perlindungan sosial korban bencana.
 - 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial keluarga dan perlindungan sosial korban bencana.
 - 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial keluarga dan perlindungan sosial korban bencana.
 - 4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, jaminan keluarga dan perlindungan sosial korban bencana.
 - 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial korban bencana.
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai

tugas dan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- 3) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- 4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miski.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Pada bab ini peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang yang menjadi objek penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara jelas tentang permasalahan yang diteliti. Ada juga responden dalam penelitian ini yakni : Kepala Dinas Sosial, Kepala Desa Wonosari, Pendamping PKH serta Masyarakat.

1. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Di dalam Tingkat pendidikan ini dapat berpengaruh terhadap kinerja, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi tingkat kinerja yang dimilikinya dan akan memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukannya penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang melibatkan beberapa unsur, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai tingkat pendidikan.

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jumlah responden	Tingkat pendidikan						jumlah
		SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	
1.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti (AGUSYANTO, S.IP., M.Si)	0	0	0	0	0	1	1
2.	Kepala Desa Wonosari (MOH.ZAINI)	0	0	1	0	0	0	1
3.	Pendamping PKH (JUFRI, S.IP)	0	0	0	0	1	0	1
4.	Masyarakat	1	0	2	0	0	0	3

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

2. Identitas Informan Berdasarkan Umur

Umur adalah faktor yang berpengaruh pada seseorang dalam menjalankan tugas yang diberikan, selain itu umur juga berpengaruh pada kinerja dikarenakan tingkat usia selalu menjadikan faktor utama yang mempengaruhi pola fikir, tingkat ketelitian dalam kerja, dan standar kemampuan fisik dalam melakukan suatu kerjaan. Untuk lebih jelas bisa di lihat pada tabel di bawah ini mengenai umur informan, sebagai berikut :

Tabel V.2 Jumlah Informan Berdasarkan Umur

No	Jumlah responden	Tahun Umur					Jumlah
		20-29	30-39	40-49	50-59	60	
1.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti (AGUSYANTO, S.IP., M.Si)	0	0	0	1	0	1
2.	Kepala Desa Wonosari (MOH.ZAINI)	0	0	1	0	0	1
3.	Pendamping PKH (JUFRI, S.IP)	0	1	0	0	0	1

4.	Masyarakat	0	2	1	0	0	3
----	------------	---	---	---	---	---	---

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2021

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan)

Setelah melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan). Maka data responden berupa pengumpulan data yaitu wawancara setelah melakukan wawancara dan observasi di lapangan mendapatkan hasil penelitian.

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan organisasi atau instansi pemerintah yang ada di daerah Kabupaten/Kota yang harus tampil sebagai pamong masyarakat dalam bidang Sosial agar dapat meningkatkan partisipasi aktif di masyarakat khususnya di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang dalam menciptakan keluarga yang lebih unggul dengan mengatasi kemiskinan sesuai dengan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan) dalam indikator yang di kemukakan oleh William N. Dum (1999;610) yang mengatakan bahwa di dalam evaluasi terdapat suatu proses. Proses menunjukkan input yang dimasukkan demi pencapaian tujuan organisasi yang harus di proses dan dikendalikan atas dasar output (realisasi) yang

disesuaikan dengan apa yang diinginkan/diharapkan oleh organisasi. Teori evaluasi ini menjelaskan secara detail dan sistematis kegiatan evaluasi yang terdiri dari :

- a. Efektifitas
- b. Efisiensi
- c. Kecukupan
- d. Pemerataan
- e. Responsivitas
- f. Ketepatan

Untuk melihat Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan), maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap informan berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, makin besar persentase target yang dicapai maka makin tinggi efektivitasnya. Berarti efektivitasnya adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.

Berdasarkan kutipan wawancara peneliti bersama dengan Bapak Agusyanto, S.IP., M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti

beliau mengatakan tentang apakah pengguna anggaran oleh Dinas Sosial sudah sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut:

“Dari anggaran atau dana yang dikeluarkan dari pusat untuk sarana dan prasarana itu sudah memenuhi kebutuhan dinas sosia dan dana yang dibutuhkan itu untuk anggaran Program Keluarga Harapan (PKH).”

(Selasa 12 Oktober 2021 Pukul 09.36 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara dengan Bapak Agusyanto, S.IP., M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti tentang apakah penerima dana yang terdata ini sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat? Dan apakah standar tujuan dan sasaran kebijakan sudah terlaksana dengan baik sebagai berikut :

“Karena bantuan ini dari pusat yang mengeluarkan nama-nama tersebut, tetapi kalau sempurna memang belum, kami tetap bertanggung jawab sebab kami dipantau dari atasan.” (Selasa 12 Oktober 2021 Pukul 09.36 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dari pihak Dinas Sosial sendiri telah melakukan penyediaan saran dan prasarana dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa wonosari kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti. Kemudian mengenai anggaran sudah dikeluarkan langsung dari pusat ke daerah yang di pantau oleh dinas sosial dalam pengeluaran dana keluarga penerima manfaat agar dananya tepat sasaran.

Berdasarkan kutipan wawancara bersama Bapak Moh.Zaini selaku Kepala Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai apakah anggaran oleh dinas sosial sudah sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan program keluarga harapan (PKH), sebagai berikut :

“Dalam program pkh ini sangat membantu desa wonosari yang tadinya keluarga beliau tidak mampu menyekolahkan anak setelah adanya pkh ini sangat membantu dan terbantu kepada masyarakat, harapannya bisa terbantu terus oleh pemerintah pusat.” (Selasa 02 November 2021 Pukul 09.25 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara bersama Bapak Moh.Zaini selaku Kepala Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai apakah penerima dan yang terdata ini sudah sesuai dengan kriteria yang di tentukan oleh pemerintah pusat dan apakah standar tujuan dan sasaran kebijakan sudah terlaksana dengan baik, sebagai berikut :

“Karena di desa wonosari ini masyarakatnya terbilang penghasilannya dari menengah kebawah.”(Selasa 02 November 2021 Pukul 09.25 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama kepala desa wonosari kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti bahwasannya untuk anggaran sudah sesuai dalam memenuhi sarana dan prasarana PKH. Dan dalam penerima PKH sudah sesuai kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat agar bantuannya tepat sasaran.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan atau perbandingan antara output atau hasil barang dan jasa yang dihasilkan dengan input yang langka dalam satuan unit kerja atau ketetapan cara dalam melakukan sesuatu. Efisiensi diartikan sebagai upaya penggunaan input yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan produksi yang sebesar-sebesarnya. Penggunaan input ini dapat dicari dengan melihat nilai tambahan dari satu-satunya biaya dari input yang digunakan dengan satuan-satuan pembinaan yang dihasilkan.

Pada indikator efisiensi ini menjelaskan mengenai tanggapan informan tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan). Untuk melihat hasil jawaban informan terhadap indikator efisiensi, sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Bapak Agusyanto, S.IP., M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti beliau mengatakan tentang apakah dalam meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sudah efisien, sebagai berikut :

“Dalam meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sangat efisien, sebab dari KPM ini yang menerima manfaat dari dana yang sudah terlaksana untuk kebutuhan dari PKH.” (Selasa 12 Oktober 2021 Pukul 09.36 WIB)

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Bapak Agusyanto, S.IP.,M.Si selaku Kepala Dinas Sosial beliau mengatakan tentang apakah saat ini para

pendamping program keluarga harapan (PKH) di setiap desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik, sebagai berikut :

“Tugas pendamping PKH di setiap desa sudah sangat baik, tetapi ada kendala dari pendamping ini memiliki jarak sehingga tidak maksimal.”(Selasa 12 Oktober 2021 Pukul 09.36 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya yakni sudah terlaksana dengan sangat baik dalam meningkatkan fasilitas pendidikan maupun pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Moh.Zaini selaku Kepala Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti tentang apakah dalam meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sudah efisien, sebagai berikut :

“Dalam meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dilihat dengan kondisi di lapangan memang belum sepenuhnya efisien.”(Selasa 02 November 2021 Pukul 09.25 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara dengan Bapak Moh.Zaini selaku Kepala Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai apakah saat ini pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di setiap Desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik, sebagai berikut :

“Masalah pendamping untuk pkh ini pendampingnya kalau bisa ditingkatkan lagi. Yang dimaksud ditingkatnya lagi itu kalau ada pencairan itu kepala desa seharusnya diberitahu ataupun diundang karena itu termasuk tanggung jawab kami masalah pkh. Jadi kami bisa menyampaikan kepada masyarakat penerima pkh atau menyampaikan kepada pendamping. Selama ini pencairan pkh kepala desa atau staf desa tidak pernah tau. Dari pendamping desa ingin bekerja sama dengan kepala desa untuk masalah pkh ini tetapi selama ini tidak ada. Jadi harapan kepala desa untuk pendamping pkh harus meningkatkan sendiri.” (Selasa 02 November 2021 Pukul 09.25 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama dengan Bapak Kepala Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk saat ini belum efisien karena masih terdapat sekolah yang kurang layak dalam pembelajaran dan kesehatan pun masih kurang memadai. Dan mengenai kinerja pendamping di lapangan cukup baik karena pendamping membuat laporan dari desa kepada camat maupun kabupaten untuk melihat hasil kerjanya dilapangan.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan atau adquacy berhubungan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah kecukupan masih berkaitan dengan efektivitas dengan mengukur atau mempredisikan seberapa jauh

alternative yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Bapak Agusyanto, S.IP., M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan tentang apakah kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) ini akan meningkatkan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat yang menerima PKH, sebagai berikut :

“Karena dalam pkh ini ada pertemuan rutin kelompok. Kpm diberikan pembekalan dan motivasi oleh pendamping.”(Selasa 12 Oktober 2021 Pukul 09.36 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Agusyanto, S.IP.,M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan tentang bagaimana cara/strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan sebelum adanya Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai berikut :

“Sebelum adanya PKH ini dari pemda kita otonom BPMT, bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu tapi banyak yang sudah kita lakukan sebelum PKH ada.”(Selasa 12 Oktober 2021 Pukul 09.36 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama Kepala Dinas Sosial Kabuapten Kepulauan Meranti bisa dilihat kalau Program Keluarga Harapan (PKH) ini bisa mereka tingkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan buat anaknya, sebelum adanya PKH maka pihak Dinas Sosial sudah mengadakan program dari pemda yaitu BPMT dan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dan masih banyak lain program yang sudah dibuat sebelum adanya PKH.

Berdasarkan kutipan wawancara kepada Bapak Moh.Zaini selaku Kepala Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai apakah kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) ini akan meningkatkan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat yang menerima PKH, sebagai berikut :

“Bahwasannya dengan adanya program PKH ini sangat membantu bagi perekonomian masyarakat. Terutama bagi yang mempunyai anak didik/sekolah bisa membeli kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan oleh anak-anak masyarakat tersebut untuk kenyamanan belajar mereka.”(Selasa 02 November 2021 Pukul 09.25 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara kepada Bapak Moh.Zaini selaku Kepala Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai bagaimana cara/strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan sebelum adanya Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai berikut :

“Sebelum adanya PKH untuk meningkatkan ekonomi atau menambah pendapatan masyarakat. Di desa wonosari ini mayoritas petani, jadi masyarakat meningkatkan hasil taninya atau mengambil upah ke Malaysia atau keluar negeri ataupun mengambil upah dengan masyarakat yang mempunyai lahan/kebun yang lebih luas. Bagi ibu-ibu nya itu juga membantu keluarga seperti motong karet walaupun tidak mempunyai kebun karet tapi beliau bisa membagi atau mengupah dengan orang yang mempunyai kebun yang luas. Tapi alhamdulillah setelah adanya PKH,

bisa menambah perekonomian masyarakat untuk membeli perlengkapan anak sekolah.”(Selasa 02 November 2021 Pukul 09.25 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama Bapak Moh.Zaini selaku Kepala Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti bahwasannya kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di desa-desa yang menerima bantuan PKH ini. Dan untuk mengatasi rantai kemiskinan pihak kabupaten, dinas sosial sudah melakukan berbagai macam cara yang dilakukannya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

4. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik Kesamaan atau equity erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada kesamaan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil distribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Bapak Agusyanto, S.IP.,M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan tentang bagaimana caranya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini menyesuaikan data kondisi lapangan, sebagai berikut :

“Untuk bantuan program PKH ini dalam bentuk tunai, jadi keluarga tersebut bisa membeli kebutuhan yang diperlukan.”(Selasa 12 Oktober 2021 Pukul 09.36 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara peneliti bersama Bapak Agusyanto, S.IP.,M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan tentang apakah setiap masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di setiap kriteria memiliki jumlah bantuan yang sama, sebagai berikut :

“Dari kriteria bantuan PKH ini ada bantuan untuk balita, ibu hamil, jadi sekolah SD,SMP,dan SMA tapi didalam itu ada keluarga itu ibu hamil tapi tidak punya balita cuman dapat satu bantuan, tapi kalau dia tidak hamil, tidak ada balita tapi dia ada anak sekolah jadi dia cuman dapat bantuan anak sekolah saja.”(Selasa 12 Oktober 2021 Pukul 09.36 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti menyesuaikan dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, sehingga bantuan dibagi merata untuk masyarakat, kemudian untuk kriteria penerima bantuan PKH pihak Dinas Sosial melakukan survey ke lapangan untuk mendata masyarakat yang memiliki anak yang sekolah, ibu hamil ataupun yang punya balita agar tidak salah dalam pembagian bantuannya.

Berdasarkan kutipan wawancara bersama Bapak Moh.Zaini selaku Kepala Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai

bagaimana caranya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini menyesuaikan data kondisi lapangan, sebagai berikut :

“Cara menyesuaikan lapangan itu kami langsung ke lapangan melihat sebatas mana masyarakat kami bekerja atau mencari hasil untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Bisa kita lihat lapangan itu yang mempunyai rumah layak atau tidaknya disitulah tadinya kita bisa menilai untuk mendapatkan bantuan PKH.”(Selasa 02 November 2021 Pukul 09.25 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara bersama Bapak Moh. Zaini selaku Kepala Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai setiap masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di setiap kriteria memiliki jumlah bantuan yang sama, sebagai berikut :

“Mereka yang mendapat bantuan PKH itu tidak sama, karena dilihat dari kondisi keluarga penerima PKH ini apakah mereka memiliki anak yang sekolah atau yang belum sekolah.”(Selasa 02 November 2021 Pukul 09.25 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama Bapak Moh. Zaini selaku Kepala Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti bahwasannya cara memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini langsung ke lapangan dengan cara melihat rumah yang tidak layak. Dan apakah setiap kriteria penerima bantuan PKH ini sama, bahwasannya tidak sama karena

dilihat dulu kondisi perekonomian mereka terlebih dahulu agar tidak salah dalam memberi bantuannya.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntunan pengguna jasa.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Bapak Agusyanto, S.IP., M.Si selaku Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan tentang apakah indikator PKH sudah memperhatikan kinerja pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai berikut :

“Dalam kinerja pendamping PKH memang dipantau lalu diminta tanggungjawab misal datanya, dan laporan kinerjanya dilapangan perbulan.”(Selasa 12 Oktober 2021 Pukul 09.36 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara bersama dengan Bapak Agusyanto, S.IP., M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti tentang apakah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat miskin, sebagai berikut :

“Sesuai dengan penerima PKH dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) jadi untuk masyarakat miskin yang menerima manfaat.”(Selasa 12 Oktober 2021 Pukul 09.36 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa dari pihak Dinas Sosial sendiri sudah memperhatikan kinerja pendamping PKH sehingga pihak dinas meminta agar segera menyerahkan laporannya setiap bulan, lalu dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk masyarakat miskin pihak dinas menyesuaikan penerima PKH dari DTKS yang benar-benar untuk penerima masyarakat miskin.

Berdasarkan kutipan wawancara bersama dengan Bapak Moh. Zaini selaku Kepala Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai apakah indikator PKH sudah memperhatikan kinerja pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai berikut :

“Dilihat dari kondisi dilapangan pihak koordinator selalu memperhatikan kinerja suatu pendamping.”(Selasa 02 November 2021 Pukul 09.25 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara bersama dengan Bapak Moh. Zaini selaku Kepala Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat miskin, sebagai berikut :

“Dari sebagian sudah terpenuhi dalam kebutuhan sarana dan prasarana tetapi secara keseluruhan masih belum terpenuhi.” (Selasa 02 November 2021 Pukul 09.25 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama Bapak Moh. Zaini selaku Kepala Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti bahwasannya koordinator PKH sudah selalu memperhatikan kinerja pendamping

PKH. Dan juga dalam pelaksanaan PKH ini sebagian sudah terpenuhi tetapi secara keseluruhan masih ada yang belum terpenuhi dalam sarana dan prasaranan.

6. Ketetapan

Ketetapan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Ketetapan merupakan faktor yang diperlukan seseorang untuk mencapai target yang diinginkan. Ketetapan berhubungan dengan keinginan untuk memberikan arah kepada sasaran dengan maksud dan tujuan tertentu.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama dengan Bapak Agusyanto, S.IP.,M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan tentang apakah sudah menetapkan masyarakat penerima bantuan PKH sesuai kriteria yang ada, sebagai berikut :

“Dari kriteria yang dilihat dari kabupaten ini hanya memasukkan data miskin ini ke data terpadu kesejahteraan sosial ini mengambil datanya dan jadi dari pusat mengeluarkan bantuan penerima manfaat ini bukan pihak dinas kita yang menentukannya.” (Selasa 12 Oktober 2021 Pukul 09.36 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara bersama dengan Bapak Agusyanto, S.IP.,M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti tentang apakah masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ini ditetapkan selamanya atau diganti setiap tahunnya, sebagai berikut :

“Penerima PKH ini dalam setiap tahunnya itu tidak diganti, tapi kalau dari pendamping dari desa mereka ini udah mampu maka keluarga itu

dikeluarkan dari data, tapi diusulkan dulu ke pusatnya untuk mengeluarkan data keluarga yang sudah mampu itu.” (Selasa 12 Oktober 2021 Pukul 09.36 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Bapak Agusyanto, S.IP.,M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti bisa dilihat bahwa kalau untuk pergantian masyarakat penerima PKH disetiap tahunnya itu tidak terjadi, apabila keluarga itu sudah mampu maka bisa di keluarkan dari data tapi harus diusulkan dahulu ke pusat untuk meminta persetujuannya.

Berdasarkan kutipan wawancara bersama dengan Bapak Moh. Zaini selaku Kepala Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai apakah sudah menetapkan masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai kriteria yang ada, sebagai berikut :

“Belum sesuai dengan kriteria yang ada karena masih terdapat data-data yang tidak sesuai di lapangan disebabkan masih ada masyarakat yang seharusnya sudah mampu tetapi masih dapat menerima bantuan PKH, sementara masyarakat yang masih layak bahkan tidak dapat menerima bantuan PKH tersebut.” (Selasa 02 November 2021 Pukul 09.25 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara bersama Bapak Moh. Zaini selaku Kepala Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai apakah masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ini ditetapkan selamanya atau diganti setiap tahunnya, sebagai berikut :

“Karena kita melihat dahulu kondisi atau keadaan mereka terlebih dahulu kalau mereka masih layak dibantu ya mereka masih dapat menerima bantuan PKH, apabila kehidupan mereka secara ekonomi sudah mampu maka sudah tidak bisa lagi menerima bantuan PKH.” (Selasa 02 November 2021 Pukul 09.25 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Moh. Zaini selaku Kepala Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti bahwasannya menetapkan masyarakat bantuan PKH sesuai kriteria yang ada bahwasannya masih terdapat adanya data-data dilapangan tidak sesuai yang diharapkan karena masih ada orang yang tidak layak tapi masih menerima bantuan PKH padahal masih banyak orang-orang yang layak dibantu. Dan juga untuk masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ini ditetapkan selamanya atau diganti, dilihat dulu keadaan ekonomi mereka apabila sudah mapan atau mencukupi maka sudah tidak bisa menerima bantuan dari PKH.

7. Pendamping PKH

Berdasarkan kutipan wawancara dengan Bapak Jufri S.IP selaku Pendamping PKH Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti apakah ada masyarakat yang tidak tepat sasaran bagi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)?, sebagai berikut :

“

Berdasarkan kutipan wawancara dengan Bapak Jufri, S.IP selaku Pendamping PKH Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan

Meranti mengenai apakah ada pembinaan kelompok? Dan apa saja yang dilakukan saat pertemuan kelompok tersebut dan bagaimana jika kalau ada yang tidak hadir dalam pertemuan kelompok tersebut, sebagai berikut :

“Sudah pasti ada pertemuan kelompok, saat pertemuan kelompok disini pendamping PKH memberikan arahan kepada masyarakat yang mendapatkan PKH. Jika ada anggota PKH yang tidak hadir pada saat pertemuan kelompok tersebut maka akan berimbas pada bantuan untuk penyalurannya, bantuannya bisa ditunda untuk tahap yang akan datang sampai anggota tersebut benar-benar aktif kembali, jika tidak ada keterangan sebagai pendamping bisa berkunjung ke rumah anggota tersebut. Bertanya apa penyebab tidak bisa hadir di pertemuan kelompok”. (Jum’at, 22 Oktober 2021 Pukul 10.05 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Pendamping PKH Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti bisa dilihat bahwa pada saat pertemuan kelompok dengan anggota PKH memberikan arahan kepada masyarakat yang mendapatkan PKH. Jika kalau salah satu anggota tidak hadir maka pihak pendamping PKH akan datang ke rumah anggota PKH untuk menanyakan apa penyebabnya tidak bisa hadir ke dalam pertemuan, kalau tidak aktif lagi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) maka bantuannya akan ditunda sampai anggota PKH itu aktif kembali.

Berdasarkan kutipan wawancara peneliti dengan Bapak Jufri, S.IP selaku Pendamping PKH Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan

Meranti, apakah sebagai pendamping mendapatkan pelatihan dari program PKH, sebagai berikut :

“Setiap pendamping PKH ada pelatihan diklat untuk meningkatkan pengetahuan pendamping masalah pemberdayaan pendamping bisa untuk memberdayakan masyarakat KPM PKH. Jadi dalam pelatihan itu ada eksternal dan internal. Internal ini dalam artian pertemuan kepada kepala dinas, begitupun eksternal ada rapat satu bulan sekali dikabupaten kalau eksternal itu tanggung jawab mengenai pendamping SOP pendamping kepada KPM”. (Jum’at, 22 Oktober 2021 Pukul 10.05 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Pendamping PKH Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti bisa dilihat bahwa para pendamping mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan pendamping PKH.

Berdasarkan kutipan wawancara bersama dengan Bapak Jufri, S.IP selaku Pendamping Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pendamping, sebagai berikut :

“Selain pertemuan kelompok, melakukan solidasi dari rumah-rumah setiap anggota PKH yaitu baik menanyakan kondisi ekonomi, kategori yang dimiliki setiap anggota”. (Jum’at, 22 Oktober 2021 Pukul 10.05 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Pendamping PKH Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti bisa dilihat bahwa

kegiatan pendamping selain pertemuan kelompok, pendamping PKH mendatangi setiap rumah anggota PKH untuk menanyakan kondisi ekonomi di setiap anggota PKH.

Berdasarkan kutipan wawancara bersama dengan Bapak Jufri, S.IP selaku Pendamping PKH Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa apakah ada sanksi sebagai pendamping dalam berbagai tingkat kegagalan, sebagai berikut :

“Setiap pendamping PKH dikasih peringatan secara tertulis maupun tidak tertulis. disini di dalam pendamping ada aturan atau SOP. Seandainya tidak melakukan pertemuan kelompok PKH yang jelas ini kewajiban kita sebagai pendamping PKH secara langsung dapat teguran dari kepala dinas kecuali ada salah satu desa yang mendapat virus corona lebih parah atau sudah memasuki zona hitam maka tidak bisa buat acara. Jadi ada istilahnya SOP kita jalankan kecuali ada hambatan dilapangan”.

(Jum’at, 22 Oktober 2021 Pukul 10.05 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Pendamping PKH Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa sanksi yang dikenakan disini di dalam pendamping PKH ada aturan atau SOP. Seandainya tidak melakukan pertemuan kelompok PKH yang jelas ini kewajiban sebagai pendamping PKH secara langsung dapat teguran dari Kepala Dinas.

Berdasarkan kutipan wawancara bersama dengan Bapak Jufri, S.IP selaku Pendamping PKH Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan

Meranti bahwa apakah anggota KPM yang telah mencapai kemandirian secara ekonomi sehingga KPM tersebut tidak lagi mendapatkan bantuan PKH, sebagai berikut :

“Pasti ada, jadi di PKH itu ada graduasi mandiri dan juga ada graduasi paksa. Disini seorang pendamping menilai jika anggota PKH status ekonominya sudah membaik atau sudah mampu disini membutuhkan peran pendamping PKH untuk memberikan penjelasan bahwa program PKH ini hanya membantu keluarga-keluarga kurang mampu dan menjelaskan bahwa anggota ini tidak layak lagi untuk menerima bantuan PKH setelah mereka memahami apa yang kita sampaikan jika mereka memiliki kesadaran sendiri ingin mengundurkan diri”. (Jum’at, 22 Oktober 2021 Pukul 10.05 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Pendamping PKH Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti bisa dilihat bahwa apabila ada keluarga yang sudah mampu secara ekonominya maka masih membutuhkan peran pendamping PKH untuk menjelaskan bahwa bantuan ini hanya diberikan untuk keluarga kurang mampu dan apabila keluarga tersebut sudah mengerti dan memiliki kesadaran ingin mengundurkan diri maka pendamping PKH mengeluarkan setelah itu pertanda keluarga yang sudah mampu dikeluarkan dari anggota PKH dan program selanjutnya tidak mendapatkan lagi bantuan.

8. Masyarakat Penerima PKH

Berdasarkan kutipan wawancara bersama dengan Ibu Faridah salah satu masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tentang apakah ibu tahu syarat-syarat untuk menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai berikut :

“Syarat penerima PKH itu ada 3 (tiga) kategori, kategori yang pertama itu ada kesehatan, dibagian kesehatan itu ada ibu hamil dan menyusui. Artinya penerima PKH itu berada dalam kondisi mengandung atau dalam kondisi menyusui. Yang kedua selanjutnya ada kategori pendidikan yaitu memiliki anak sekolah antara 6-12 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yaitu dari SD,SMP dan SMA. Yang kategori ketiga itu ada kesejahteraan sosial yang merupakan orang tua atau lansia yang berusia 70 tahun keatas”. (Selasa, 19 Oktober 2021 Pukul 12.05 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Faridah selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) itu bahwasannya syarat untuk menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ada tiga kategori, yaitu kategori kesehatan, kategori pendidikan, dan kategori kesejahteraan sosial.

Berdasarkan kutipan wawancara bersama Ibu Siti Nurhinda selaku masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tentang apakah ibu tahu syarat-syarat untuk menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai berikut :

“Syarat penerima PKH sesuai dengan kriteria ada 3 kategori yang pertama ada kesehatan yang contohnya seperti ibu hamil serta menyusui,

yang kedua selanjutnya mengenai pendidikan yaitu yang memiliki anak masih sekolah SD,SMP dan SMA, yang ketiga yaitu kategori kesejahteraan sosial yaitu lansia yang berusia 60 tahun keatas”. (Selasa, 19 Oktober 2021 Pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Siti Nurhinda selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) bahwasannya syarat yang menjadi penerima PKH itu ada 3 (tiga) kategori yaitu ada kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan kutipan wawancara bersama Ibu Nurul Aini selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mengenai tentang apakah ibu tahu syarat-syarat untuk menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai berikut :

“Dilihat dari kriteria PKH syarat menjadi penerima PKH itu ada beberapa kategori yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial”.

(Rabu, 10 November 2021 Pukul 16.15 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Nurul Aini selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) bahwasannya syarat-syarat PKH yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan ada 3 kategori yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan kutipan wawancara bersama Ibu Faridah selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mengenai tentang bagaimana perasaan ibu setelah mendapatkan bantuan PKH, sebagai berikut :

“Saya merasa sangat bersyukur dan sangat terbantu, dan setiap bulannya PKH ini memberikan sembako yang berupa beras, telur, kacang dan lain-lain. Itu sangat membantu kebutuhan dirumah begitu juga dengan bantuan tunai yang diberikan, setiap 3 bulan sekali itu juga membantu kebutuhan sekolah”. (Selasa, 19 Oktober 2021 Pukul 12.05 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Faridah selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) itu bahwasannya mengenai perasaan masyarakat yang mendapatkan bantuan dana PKH merasa sangat bersyukur karena sangat terbantu perekonomiannya setiap bulan.

Berdasarkan kutipan wawancara bersama Ibu Siti Nurhinda selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mengenai tentang bagaimana perasaan ibu setelah mendapatkan bantuan dana PKH, sebagai berikut :

“Saya sangat bersyukur dan berterimakasih pada pemerintah yang mengadakan program PKH ini karena saya setiap bulannya diberikan bantuan yang berupa sembako dan juga uang tunai dengan ini keluarga saya merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”. (Selasa, 19 Oktober 2021 Pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Siti Nurhinda selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mengenai perasaan Ibu Siti Nurhinda berterimakasih kepada pemerintah telah memperhatikan masyarakat

miskin sehingga memberikan bantuan perbulan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan kutipan wawancara bersama Ibu Nurul Aini selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mengenai tentang bagaimana perasaan ibu setelah mendapatkan bantuan dana PKH, sebagai berikut :

“Saya bersyukur mendapatkan bantuan dana dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya”. (Rabu, 10 November 2021 Pukul 16.15 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Nurul Aini selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) bahwasannya merasa bersyukur atas pemberian bantuan dana dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Berdasarkan kutipan wawancara bersama Ibu Faridah selaku masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengenai tentang apakah pendamping menjelaskan dengan baik tentang program PKH tersebut, sebagai berikut :

“Ya tentu saja pendamping PKH, pendamping PKH setiap ada pengumuman/informasi ia menyampaikannya kepada anggota, jika misalnya anggota yang tidak paham maka pendamping tersebut menjelaskan kembali kepada anggota yang bersangkutan itu”. (Selasa, 19 Oktober 2021 Pukul 12.05 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Faridah selaku masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bahwasannya setiap pendamping apabila ada informasi langsung menyampaikan kepada anggota, apabila anggota tidak paham maka pendamping itu yang menjelaskan kembali kepada yang bersangkutan.

Berdasarkan kutipan wawancara bersama Ibu Siti Nurhinda selaku masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mengenai tentang apakah pendamping menjelaskan dengan baik tentang program PKH tersebut, sebagai berikut :

“Ya tentu saja soalnya pendamping apabila ada informasi penting maka disampaikan langsung kepada anggota PKH, apabila salah satu anggota yang tidak mengerti maka pendamping memberikan arahan kepada anggota yang tidak mengerti tadi agar dijelaskan kembali supaya dia mengerti apa yang disampaikan oleh pendamping”. (Selasa, 19 Oktober 2021 Pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Siti Nurhinda selaku masyarakat penerima PKH bahwasannya pendamping menjelaskan atau memberikan informasi kepada anggota PKH secara perlahan-lahan agar masyarakat mudah dimengerti.

Berdasarkan kutipan wawancara bersama Ibu Nurul Aini selaku masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengenai

tentang apakah pendamping menjelaskan dengan baik tentang program PKH tersebut, sebagai berikut :

“Pendamping pada saat menjelaskan kepada anggota secara kemasyarakatan yaitu menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh anggota PKH pada saat penyampaian pendamping yang memberikan penjelasan mengenai informasi penting”. (Rabu, 10 November 2021 Pukul 16.15 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Nurul Aini selaku masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bahwasannya pendamping pada saat menjelaskan informasi menyesuaikan bahasanya kepada masyarakat agar informasi yang diberikan dapat dipahami sama anggota PKH.

C. Faktor Penghambat Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan).

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, yang menjadi hambatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Pendidikan), sebagai berikut :

1. Kurangnya efisien terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga peserta yang mempunyai anak tidak mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Hasil wawancara bersama Bapak Moh. Zaini beliau menyebutkan bahwa :

“Dari sebagian sudah terpenuhi dalam kebutuhan sarana dan prasarana tetapi secara keseluruhan masih belum terpenuhi.”

2. Terhambat oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di desa saat menjalankan tugasnya. Hasil wawancara bersama Bapak Agusyanto, S.IP., M.Si beliau menyebutkan bahwa :

“Tugas pendamping PKH di setiap desa sudah sangat baik, tetapi ada kendala dari pendamping ini memiliki jarak sehingga tidak maksimal.”

Jadi, pendamping PKH pada saat menjalankan pekerjaan di lapangan terhambat oleh jarak tempuh dalam mendata peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Selanjutnya hambatan dalam menetapkan masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) belum tepat sasaran. Hasil wawancara bersama Bapak Moh. Zaini beliau menyebutkan bahwa :

“Belum sesuai dengan kriteria yang ada karena masih terdapat data-data yang tidak sesuai di lapangan disebabkan masih ada masyarakat yang seharusnya sudah mampu tetapi masih dapat menerima bantuan PKH, sementara masyarakat yang masih layak bahkan tidak dapat menerima bantuan PKH tersebut.”

Jadi, yang di maksud hambatan diatas yaitu masyarakat yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran.

4. Kurangnya koordinasi kerjasama antara pendamping PKH dengan Pemerintahan Desa dalam menetapkan peserta PKH atau pencairan PKH. Hasil wawancara bersama Bapak Moh. Zaini beliau menyebutkan bahwa :
“Masalah pendamping untuk PKH ini pendampingnya kalau bisa ditingkatkan lagi koordinasi kepada kepala desa ketika ada pencairan dana PKH. Seharusnya kepala desa diberitahu atau diundang karena itu termasuk tanggung jawab kami. Jadi kami bisa menyampaikan kepada masyarakat penerima PKH atau menyampaikan kepada pendamping. Jadi harapan kepala desa untuk pendamping PKH harus tingkatkan lagi komunikasinya.”
5. Masih terkendala pada saat menyampaikan informasi kepada masyarakat yang sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum paham dalam program PKH. Hasil wawancara bersama Bapak Jufri, S.IP beliau menyebutkan bahwa :
“Saat pertemuan kelompok disini pendamping PKH memberikan arahan kepada masyarakat yang mendapatkan PKH. Tetapi banyak masyarakat menanyakan kembali setiap pertemuan kelompok.”

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak mendapatkan bantuan terhambat karena kurang teliti dalam mendata masyarakat miskin pada saat di lapangan, dan juga fasilitas pendidikan dan kesehatan sepenuhnya belum terpenuhi oleh pemerintah sehingga anak-anak masih terdapat ada yang belum sekolah. Hal ini dicantumkan dalam peraturan menteri sosial No 1 Tahun 2018 tentang “Program Keluarga Harapan (PKH)” dalam pasal 2 yang bertujuan yaitu untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan ini pemerintah kabupaten menyediakan sarana dan prasarana pendidikan maupun kesehatan agar masyarakat penerima manfaat menjadi sejahtera.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam studi kasus pendidikan di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti ini belum sepenuhnya efektif. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa faktor yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Dari segi kecukupan, pelaksanaan PKH di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti sudah dapat dikatakan mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat. Mengenai pemerataan, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikatakan belum merata. Para pendamping PKH yang bertugas turun langsung ke lapangan melayani masyarakat

bersikap responsif, cekatan dan dengan sigap membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Masih banyak anggota yang enggan melakukan graduasi mandiri dan masih menggantungkan kebutuhan sehari-hari mereka dengan bantuan dari PKH.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan dapat mengatasi kemiskinan di setiap kecamatan maupun desa dengan cara memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan agar anak-anak yang kurang mampu dapat pendidikan dan kesehatan yang gratis.
2. Kepada Kepala Desa Wonosari Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan masyarakatnya lebih memperhatikan masyarakat yang kurang mampu dengan cara memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat supaya bisa mengatasi kemiskinan secara optimal.
3. Kepada pendamping PKH diharapkan meningkatkan pengawasan dan pemahaman kepada RTSM agar bantuan yang diterima dapat digunakan sesuai dengan ketentuan PKH.
4. Kepada masyarakat agar merubah pola pikir budaya tradisional serta lebih memperhatikan lingkungan sekitar agar bisa lebih maju dari sebelumnya supaya bisa mengatasi rantai kemiskinan.

5. Kepada Kepala Dinas Sosial, Kepala Desa Wonosari, Pendamping PKH sebaiknya lebih teliti lagi mengawasi bawahannya agar tidak salahgunakan data di saat turun ke lapangan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Asrul, R. A. (2014). *Evaluasi Pembelajaran*. Cita Pustaka Media.
- Awan Y. Abdoellah, Y. R. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung.
- Bambang, R. (2015). *Menangani Kemiskinan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Edi, S. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Elis Ratnawulan, R. (2014). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kadir, A. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia*. DHARMASRAYA: CV. DHARMA PERSADA.
- N.Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua UGM*. GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Ndraha, T. (2005). *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2015). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suharto. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta : Ombak.
- Suryawati, C. (2005). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Tesis. Tidak Diterbitkan. Universitas Diponegoro.
- Syafi'i, I. K. (2007). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Syafi'i, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. CV. Mandar Maju.
- Syafi'i, I. K. (2014). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tamboto, M. (2019). *Model Pengetasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*. Malang: CV. Seribu Bintang.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Zulkifli, d. (2013). *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol UIR.

Jurnal

(n.d.).

Ade Kurniawan, L. H. 2021. Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang . *Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang*.

Andira, A. B. 2018. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Samarinda. *Kesmes, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional eJournal Ilmu Pemerintahan*.

Arif Citra Permana, C. S. 2018. Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Di Kota Malang (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).

Arif Citra Permana, C. S. 2018. Program Keluarga Harapan Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Di Kota Malang (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).

Arif Effendi A. S, Y. 2019. Evaluasi Program Keluarga Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang .

Isnaini, R. (. (n.d.). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karang Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran .

Kartiwati. 2017. Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam . *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung*.

Maya Dehani, D. H. 2018. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.

- Miranda, M. 2019. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.
- Muhammad Daud, Y. M. 2018. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin .
- Prawoto, N. 2009. Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya .
Junal Ekonomi dan Studi Pembangunan .
- Roidah, I. S. 2016. Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
- Rosdiana, F. A. 2020. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.
- Sitti Mania, H. 2018. Evaluasi Pelaksanaan Program Character Building Training di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sri Davi Anggraeni, B. S. 2020. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Di Desa Kupang Nunding Kecamatan Muara Uya. *Kabupaten Tabalong*.
- Yeni Aulia Febriani, J. L. 2020. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.

Skripsi

- Daldi, J. 2018. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan XII Koro Kampar Kabupaten Kampar .
- Guswati, S. 2016. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.
- Pradana, F. 2018. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Aluran Beras Miskin (Raskin) Di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Susanto, H. 2016. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kebayaran Lama Jakarta Selatan.

Yulia, R. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Gratis Bagi Keluarga Miskin Di Yayasan Ibnu Sina Maleo Bintaro Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.

Dokumentasi

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2018